



# KALPATARU

Mewujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan



## ✓ PENCEMARAN TANAH

Salah Satu Indikasi Belum Terkelolanya Limbah B3 Dengan Baik

## ✓ Tata Cara Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup

## ✓ Usaha Perhotelan Harus Lakukan Efisiensi dan Konservasi Air

Pengendalian ✓  
Kerusakan

## TELAGA

di Gunung Kidul

RENCANA KEGIATAN,  
AMDAL DAN KETERLIBATAN  
MASYARAKAT DALAM  
PROSES IZIN LINGKUNGAN





Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

Kepala BLH DIY

## HARAPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ERA PEMERINTAHAN BARU

**P**engelolaan lingkungan hidup yang bertujuan menjaga pemanfaatan ekosistem dan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampungnya, bukanlah persoalan yang sederhana dan mudah. Pada era pemerintahan sebelumnya, meskipun telah dibentuk lembaga khusus yang menangani lingkungan hidup dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, namun persoalan lingkungan tetap belum dapat diatasi secara baik. Pencemaran air, polusi udara, kerusakan lahan, kekeringan, banjir dan konversi lahan produktif/lindung cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Belum lagi isu lingkungan hidup global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan degradasi keanekaragaman hayati juga tidak mudah untuk diatasi.

Persoalan lingkungan hidup merupakan pekerjaan yang tidak pernah akan selesai sampai akhir zaman dan bahkan akan semakin pelik dan kompleks dari waktu ke waktu, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertum-

buhan pembangunan dan tuntutan ketersediaan barang/jasa yang diperlukan oleh manusia. Praktek pelaksanaan pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetapi mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan justru akan memperoleh hasil yang sebaliknya.

"Perilaku nakal" oleh individu, korporasi, komunitas atau lembaga yang mengorbankan lingkungan hidup dengan mengatasnamakan kesejahteraan manusia, pertumbuhan ekonomi, kemajuan wilayah atau pemenuhan kebutuhan manusia, nampaknya tidak pernah surut. Wajar jika upaya penyadaran, edukasi publik dan penegakan hukum lingkungan merupakan bagian upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tak terpisahkan dan perlu terus dilakukan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla yang menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan tentu bukan bermaksud akan melemahkan eksistensi pengelolaan lingkungan di negara kita, namun justru untuk memperkuat dan lebih meneguhkan eksistensi pengelolaan lingkungan hidup. Namun memang hal ini perlu kepiawaian menteri baru beserta jajaran yang membantunya dalam menterjemahkan

dan merumuskan kebijakan untuk membawa pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkualitas.

Di sisi lain persoalan pengelolaan hutan juga tidak kalah pelik dengan persoalan lingkungan hidup, seperti deforestasi, alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan konflik kehutanan dan tapal batas. Semuanya itu memerlukan perhatian serius dalam penanganannya. Tentunya harapan pengelolaan hutan yang lebih baik juga tidak boleh diabaikan. Hal ini mengingatkan hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati yang besar.

Evaluasi keberhasilan dan kekurangan pengelolaan lingkungan hidup di masa lalu dapat dijadikan referensi untuk menyusun langkah ke depan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Harapan besar ke depan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan lebih berkualitas tentu menjadi dambaan bagi kita semua. Lingkungan hidup yang baik merupakan syarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Akankah sinergisitas perbaikan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan hutan dapat berjalan dengan harmoni, tentu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Semoga...

# DAFTAR ISI

## OPINI

Pencemaran Tanah.....2

Pengendalian Kerusakan Telaga di Gunung Kidul.....5

## WAWASAN

Tata Cara Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup.....7

Relevansi Kampung-Hijau dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....9

Usaha Perhotelan Harus Lakukan Efisiensi Dan Konservasi Air...11

Status Mutu Air Sungai dengan Metode Storet .....14

Rencana Kegiatan, Amdal Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Izin Lingkungan.....18

Pengalaman Terganggu Kabut Asap.....21

## BERITA LINGKUNGAN

Hasil Pemantauan Air Sungai: Kandungan Bakteri *E. coli* Tinggi.....23

Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.....24

Monitoring Karst BLH DIY di Goa Seropan, Gunungkidul .....25

## TOPIK UTAMA

Pengaruh Eksploitasi Air Tanah dalam Terhadap Penurunan Muka Airtanah Dan Kualitas Airtanah di DIY.....27

Air dan Upaya Pelestariannya .....32

## KONSULTASI LINGKUNGAN

Pohon Kemeyan Memasuki Kategori Langka.....33

## EKOSISTEM

Geopark Nasional Gunungsewu, Warisan Alam nan Eksotik .....35

## INFO KUALITAS LINGKUNGAN

Lahan Kritis di DIY dan Penanggulangannya .....37

## SERBA-SERBI

HIDROFONIK, Solusi Bercocok Tanam Minim Lahan.....39

PANTAI SANGLEN, Keindahan Tepi Laut yang Masih Alami...41



Diterbitkan Oleh:  
Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab:  
Kepala BLH DIY

Pimpinan Redaksi:  
Drs. Setiawan Rineksa, MM

Anggota Redaksi:  
Siswanto, SH., Slamet Suprianto, Teno Sulistiyanto, S.Si., Denni Noviandari, SP,

Alamat Redaksi:  
Kantor BLH DIY, Jl. Tentara Rakyat  
Mataram 53, Yogyakarta  
Telp. (0274) 563 014,  
Website: [www.blh.jogjaprovo.go.id](http://www.blh.jogjaprovo.go.id)



**K**abut asap atau yang dalam istilah Bahasa Inggris disebut *smog* (dari kata *smoke* dan *fog*) adalah merupakan akibat dari pencemaran udara berat yang terjadi selama sehari-hari hingga berbulan-bulan. Pencemaran berat tersebut dapat berasal dari kendaraan bermotor, hasil pembakaran batubara atau bahan bakar industri, aktivitas gunung berapi, dan kebakaran hutan. Dalam kondisi cuaca yang menghalangi sirkulasi udara, kabut asap dapat lebih lama lagi menutupi suatu kawasan.

Kabut asap yang hampir setiap tahun melanda Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, lebih disebabkan karena kebakaran hutan. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif dan Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam situs <http://www.mediaindonesia.com> yang dirilis tanggal 20 September 2014, bahwa dari hasil penyelidikan 99% kebakaran di Sumatera, terutama Riau disebabkan aktivitas masyarakat dan perusahaan perkebunan yang membuka lahan baru skala besar yang sengaja membakar lahan untuk menghemat biaya pengelolaan dan pembukaan lahan perkebunan baru sawit. Aktivitas ilegal tersebut telah menyebabkan Sumatera Selatan dalam status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Kerugian ekonomi akibat bencana tersebut sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Kebakaran hutan di Riau pada Februari hingga April 2014 saja telah menimbulkan kerugian hingga Rp. 20 triliun. Selain kerugian materi, hutan cagar biosfer seluas 2.398 ha dan 21.914 ha lahan pertanian serta perkebunan di Riau

PENGALAMAN TERGANGGU

# KABUT ASAP

terbakar.

Dampak negatif kabut asap yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan, bahkan sampai ke wilayah negara tetangga selama ini hanya saya dengar atau baca dari berita-berita di media massa. Akan tetapi, kali ini saya merasakan sendiri dampak negatifnya saat harus bepergian ke Palembang. Penerbangan saya ditunda berjam-jam karena jadwal penerbangan kacau. Banyak pesawat tidak bisa mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Palembang akibat jarak pandang yang terganggu kabut asap.

Banyak media massa melansir berita tentang gangguan penerbangan akibat kabut asap di beberapa kota, seperti Medan, Riau, Jambi, Lampung, Palembang, dan Palangkaraya. Sejumlah maskapai penerbangan menderita kerugian materiil yang sangat besar akibat gangguan kabut asap ini. Kerugian mencapai ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Pos Kota 12 Oktober 2014 memberitakan bahwa PT Garuda Indonesia mengalami kerugian materi sekitar Rp 20 miliar per bulan akibat kabut asap yang melanda sejumlah daerah tersebut, karena harus mengeluarkan biaya tambahan seperti avtur karena harus berputar-putar dahulu menunggu perintah untuk *landing*, ditambah biaya waktu tunggu lama saat *akantake off*, memberikan makan

bagi penumpang *delay* dan lainnya. Hal ini karena penundaan pendaratan atau keberangkatan telah mengacaukan performa ketepatan penerbangan.

Selain gangguan transportasi, dampak kebakaran hutan yang saya rasakan adalah gangguan kesehatan, yaitu mata terasa pedih dan batuk. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama menjelaskan melalui situs [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), bahwa ada delapan gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat kabut asap, yaitu:

1. Iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi.
2. Memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik).
3. Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas.
4. Mereka yang berusia lanjut dan anak-anak (juga mereka yang punya penyakit kronik) dengan daya tahan tubuh rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan
5. Kemampuan paru dan saluran pernapasan mengatasi

infeksi berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi.

6. Secara umum berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk.
7. Bahan polutan di asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi, kemungkinan juga dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi.
8. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi, terutama karena ketidakseimbangan daya tahan tubuh (*host*), pola bakteri/virus dan lain-lain penyebab penyakit (*agent*) dan buruknya lingkungan (*environment*).

Pengalaman terganggu kabut asap membuat saya menjadi bertanya, mengapa permasalahan kebakaran hutan yang disengaja (ilegal) tersebut terus terjadi setiap tahun? Seperti saya melihat sendiri di sepanjang perjalanan saya dari Kota Palembang ke Kayuagung, sisa-sisa kebakaran menjadi pemandangan yang sepertinya sudah biasa. Semoga segera ditemukan solusi sehingga tahun depan kasus gangguan kabut asap tidak lagi terjadi.

Oleh: Dr. Tien Aminatun, M.Si  
(FMIPA-Universitas Negeri Yogyakarta)

Sisa-sisa kebakaran hutan  
(Dok Pribadi, Okt 2014)